

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi individu khususnya penyalahgunaan dana bantuan lebih marak terjadi karena lemahnya akuntabilitas politik sebagai mekanisme kontrol utama sistem pemerintahan Tiongkok memberikan akses luas kepada pejabat desa dan kecamatan yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan dalam hierarki birokrasi untuk keuantungan publik maupun pribadi (Wu & Christensen, 2021). Fenomena *fraud* Negara Indonesia berdasarkan laporan tahunan ACFE 2025 didalam instansi pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi tempat maraknya *occupational fraud* dengan tingkat yang sama yaitu 26,14% hal ini menunjukkan tingkat risiko yang tinggi tempat terjadinya *fraud*. *Occupational fraud* yang sering terjadi yakni korupsi mencapai 47,6% (ACFE, 2025). Korupsi pada level pemerintah desa menempati posisi tertinggi dengan 176 kasus korupsi diikuti pemerintah kabupaten 146 kasus, BUMD 39 kasus, pemerintah kota 33 kasus dan pemerintah provinsi 22 kasus (Diky *et al*, 2022). Salah satu kasus yang terjadi didesa adalah korupsi dana PKH pada desa X di Kabupaten Bangkalan berupa dana bantuan sosial pemerintah yang tidak tersalurkan secara menyeluruh kepada penerima tahun 2017-2021(MA, 2024).

Penyelewengan dana berupa korupsi sangat rentan terjadi pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga perlu diperhatikan dalam pengawasan organisasi sektor publik nya dengan melalui APIP yang berperan dalam mengawasi jalan nya pengelolaan keuangan desa (Anisah & Falikhatun, 2021). APIP melakukan pengawasan yang bertujuan sebagai pencegahan dan deteksi dini agar tidak terjadi penyimpangan dalam

pengelolaan keuangan (Mewengkang *et al*, 2016). Peran APIP dapat berjalan efektif didukung oleh audit internal yang profesional dan memiliki kompetensi sehingga menghasilkan audit internal yang lebih berkualitas. Audit yang berkualitas memberikan cerminan pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik juga bertanggung jawab (Asmara & Hamidah, 2022). Keberadaan fungsi audit internal sebagai agen bagi pemerintah daerah memiliki keuntungan menjelaskan masalah terkait dengan pemerintahan (Legodi & Coetzee, 2025).

Terdapat tantangan dan hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja audit internal seperti kurangnya independensi, sumber daya yang tidak memadai atau kurangnya dukungan manajemen secara spesifik audit yang baik dapat menghasilkan lebih sedikit korupsi di sektor publik (Mattei *et al*, 2021). Audit internal berperan penting dalam memverifikasi keakuratan dan kelengkapan informasi yang diungkapkan oleh publik yang secara proaktif mengidentifikasi dan melaporkan potensi konflik kepentingan atau transaksi yang tidak wajar yang mengarah pada *tunnelling* dalam konsep pemerintahan seperti halnya korupsi dan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi (Hu *et al*, 2025). Audit pada dasarnya menuntut keahlian tinggi di bidang-bidang khusus, yang menempatkan auditor di bawah tekanan yang signifikan tekanan ini muncul tidak hanya dari upaya memenuhi harapan klien, tetapi juga dari tanggung jawab penting untuk menjaga kepercayaan publik (Ary *et al*, 2024).

Dukungan kepemimpinan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas audit dan diperlukan untuk mengeksplorasi efektivitas audit internal (Zhu *et al*, 2021). Hegemoni politik dan birokrasi dapat menghambat akuntabilitas demokratis dan integrasi dalam audit sektor publik (Sumiyana *et al*, 2023).

Efektivitas audit internal didukung manajemen dan kompetensi auditor internal; kepatuhan pada standar audit internal; kualitas dan prosedur audit internal juga rekomendasi yang telah ditindaklanjuti (Edra & Umanto, 2024). Sebelumnya efektivitas audit perlu didukung peran auditor dalam mencegah kecurangan, efektifitasnya masih dilihat pada budaya organisasi dan komitmen pimpinan. Hal ini menandakan perlunya eksplorasi lebih dalam mengenai hubungan antara budaya organisasi, kepemimpinan dan efektivitas audit dalam mencegah korupsi di sektor publik (Mukoffi *et al*, 2023; Rosidi *et al*, 2023).

Fenomena ini menunjukkan bahwa keandalan laporan keuangan tidak hanya bergantung pada kemamuan profesional auditor tetapi dipegaruhi oleh karakteristik personal yang dimiliki. Dalam penelitian ini, keberadaan auditor perempuan dipersepsikan memberikan nilai tambah melalui sikap skeptis dan ketelitian yang mendukung kualitas pengawasan (Ary *et al* 2024). Skeptisisme auditor meningkat ketika perhatian visual mereka difokuskan melalui perilaku dorongan dalam memproses bukti dengan berpikir secara kritis, ekspektasi sosial dan akuntabilitas yang membuat auditor menjadi lebih skeptis dan berdampak pada efektivitas auditor (Gajewski *et al*, 2025). Skeptisisme profesional menjadi salah satu prinsip mendasar dalam audit yang menuntut auditor untuk lebih waspada terhadap potensi salah saji akibat kesalahan maupun kecurangan karena kualitas audit sangat bergantung pada sejauh mana auditor mampu menerapkan sikap skeptis secara konsisten dalam setiap tahap pemeriksaan (Richins *et al*, 2024).

Auditor dengan tingkat skeptisisme tinggi cenderung semakin kritis dalam menantang manajemen. Auditor dengan orientasi *client service* (rendah skeptisisme) justru menjadi kurang kritis dan lebih mudah menerima pandangan

manajemen sehingga, mengindikasikan bahwa sikap skeptis bukan hanya persoalan kepribadian bawaan tetapi juga kondisi yang dihadapi oleh auditor (Bhaskar *et al*, 2023). Disisi lain auditor perempuan diasosiasikan dengan audit yang lebih hati-hati, efisien, teliti, dan berpotensi memakan waktu (Owusu *et al*, 2024). Dengan adanya sikap kritis tersebut auditor mampu menilai keandalan dokumen dan mengidentifikasi adanya kecurangan serta menentukan prosedur tambahan apabila ditemukan kondisi yang mencurigakan (Icih & Riyunti, 2020). Hal ini menegaskan pentingnya penguatan sikap skeptis pada auditor internal pemerintah karena sebagai salah satu instrumen dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan diharapkan mampu memperkuat terwujudnya prinsip *good governance* dan *clean government* (Astuti *et al*, 2016).

Penelitian terkait pengawasan sektor publik telah berkembang dari berbagai sudut pandang mulai dari peran SAI (*Supreme Audit Institution*) lembaga audit dalam mendorong akuntabilitas demokratis yang terintegrasi (Cordery *et al*, 2022). Sistem pengawasan yang bebas dari hegemoni politik dan birokrasi (Sumiyana *et al*, 2023). Penelitian lain mengungkapkan efektivitas pengendalian internal dengan fokus pada optimalisasi kode etik dan budaya organisasi dapat menghindari terjadinya kecurangan (Asmara & Hamidah, 2022; Mukoffi *et al*, 2023). Kajian Lain juga menyoroti pentingnya menjaga independensi auditor dari entitas audit juga kompetensi teknis yang dimiliki para auditor (de Widt, *et al* 2022). Sebagian studi mengatakan bahwa auditor perempuan memiliki kecenderungan lebih teliti dan konservatif terhadap kualitas audit yang lebih tinggi serta meningkatkan nilai ekonomi jasa audit melalui premi biaya (Owusu *et al*, 2024). Tidak hanya itu Auditor perempuan mampu menjaga keseimbangan melalui pengelolaan waktu yang efisien dan pengendalian stres

yang terencana kombinasi tersebut membantu menjalankan pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab (Ary, *et al* 2024).

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa tingkat empati yang lebih tinggi dan peran sosial yang dimiliki perempuan memungkinkan untuk berkompromi dengan klien sehingga berpotensi dalam kasus pelaporan keuangan yang meragukan dan berdampak pada kualitas audit yang rendah (Yang *et al*, 2018). Tetapi Menhaz & yang (2025) mengatakan peningkatan keberagaman gender dapat memperkuat kuat representasi dan suara perempuan serta mendorong kesetaraan dan inklusi gender yang menarik banyak perempuan untuk memfasilitasi mereka ke posisi kepemimpinan. Kemudian dalam penelitian Velte Patrick (2025) mengatakan anggota perempuan dalam komite audit cenderung lebih independen sehingga menghasilkan kepekaan yang lebih tinggi terhadap isu lingkungan dan praktik pemantauan yang lebih ketat. Kajian pada konteks lokal APIP perempuan dalam skeptisisme profesional dan bantuan sosial desa masih sangat terbatas. Celah inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menghadirkan perspektif baru mengenai peran auditor perempuan.

Objek dalam penelitian ini menggunakan kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa X. Kerugian keuangan negara mencapai sebesar 4.254.165.769,00 (MA, 2024). Pengungkapan kasus dilakukan oleh APIP sebagai dasar dalam menganalisis indikasi dalam kasus tersebut. Penelitian ini berupaya mengambil celah dengan menyoroti sikap skeptisisme APIP yang dipadukan dengan peran auditor perempuan dalam mencegah kecurangan. Keterlibatan mereka bukan hanya menambah variasi demografis dalam profesi auditor tetapi juga berperan dalam pengawasan. Dengan menggunakan kasus PKH di Desa X penelitian ini diharapkan dapat

menggambarkan sikap skeptisisme auditor internal pemerintah yang memberikan peran dalam mendeteksi indikasi adanya kecurangan.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah penelitian ini berfokus pada interaksi perspektif aparat APIP perempuan dalam skeptisisme profesional dalam konteks fenomena korupsi yang terjadi dalam program bantuan sosial PKH yang disebabkan oleh beberapa pihak oknum desa dan pendamping PKH. Berdasarkan fokus tersebut pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana sikap skeptisisme profesional aparat APIP perempuan dalam mengungkap korupsi pada kasus program bantuan sosial PKH di Desa X?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran aparat APIP perempuan dalam menangani kasus korupsi Dana PKH di desa X dalam penerapan sikap skeptisisme pada APIP yang berkontribusi terhadap efektivitas pengawasan internal pemerintah dalam mendeteksi korupsi pada kasus desa X dan juga bermaksud untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai aparat APIP perempuan dalam upaya memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor publik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada literatur pengawasan keuangan negara dan tata kelola sektor publik dengan menekankan peran APIP Perempuan dalam menangani kasus dana bantuan sosial. Temuan penelitian memperkaya pemahaman mengenai struktural dan kultural dalam efektivitas pengawasan. Selain itu penelitian ini menegaskan relevansi Teori skeptisisme

Profesional yang menjadi pondasi utama dalam proses audit penerapan teori ini memberikan landasan konseptual untuk memahami bagaimana karakteristik profesional auditor perempuan.

1.4.2 Manfaat Empiris

Secara empiris penelitian ini mengungkap tantangan dan peluang dalam pengawasan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat desa berdasarkan kasus nyata Desa X. Dengan memberikan gambaran mendalam mengenai sistem pengendalian internal dalam penyaluran dana PKH, peran perempuan dalam APIP dan pengaruhnya terhadap efektivitas deteksi kecurangan sehingga temuan ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya tentang penguatan tata kelola keuangan desa dan peran auditor perempuan dalam pengawasan publik.

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang langsung dapat diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi dana bantuan sosial. Bagi APIP temuan penelitian dapat menjadi acuan untuk memperkuat mekanisme pengawasan, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas SDM dan penguatan sistem pelaporan. Selain itu penelitian ini juga menyoroti pentingnya mengoptimalkan peran perempuan dalam tim pengawasan.